

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam analisis proses dinamika politik pelarangan TikTok Shop di Indonesia pada tahun 2023 dengan penerapan Permendag No. 31 tahun 2023, terlihat bahwa kebijakan tersebut mencerminkan interaksi kompleks antara kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Pembuatan kebijakan Permendag No.31 Tahun 2023 merupakan sebuah tindakan upaya pemerintah Indonesia dalam konteks pemerintah mengupayakan untuk melindungi kepentingan lokal, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), dari persaingan yang tidak sehat dan praktik harga merugikan oleh penjual asing di *platform* TikTok Shop.

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa pelarangan TikTok Shop memicu respons yang beragam dari masyarakat, dengan keuntungan bagi UKM lokal yang dilindungi oleh kebijakan tersebut namun juga kerugian bagi jutaan penjual *online* yang bergantung pada TikTok Shop sebagai saluran penjualan. Hal ini menggambarkan konflik antara kepentingan nasional dalam mempertahankan ekonomi lokal dan kepentingan individu dalam mempertahankan mata pencaharian mereka. Dalam konteks teori proteksionisme, kebijakan tersebut mencerminkan upaya untuk melindungi ekonomi dalam negeri dari persaingan luar yang tidak adil serta menangkal efek buruk dari globalisasi digital yang merupakan inti dari prinsip proteksionisme. Perlindungan terhadap UKM dan pasar tradisional melalui pelarangan TikTok Shop adalah contoh konkret dari upaya proteksionisme ekonomi.

Permendag No. 31 Tahun 2023 adalah langkah yang penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia. Dengan mengambil langkah-langkah untuk melindungi UMKM, menghindari *predatory pricing*, dan mengawasi serta menstabilkan ekonomi dalam sektor perdagangan, pemerintah berharap untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, sehat, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan digital di Indonesia. Secara keseluruhan, kebijakan Permendag No. 31 tahun 2023 mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi UMKM, mencegah praktik *predatory*

pricing, dan mengawasi serta menstabilkan ekonomi dalam sektor perdagangan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kebijakan proteksionisme perdagangan juga memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan, seperti potensi kebijakan impor dan ekspor dari negara-negara lain dan dampaknya terhadap hubungan perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kepentingan ekonomi nasional secara keseluruhan.

5.2 Limitasi Penelitian

Batasan atau kelemahan dalam penelitian ini terutama terletak pada proses pengumpulan data. Peneliti menyadari bahwa setiap penelitian pasti memiliki kekurangan dan berbagai kelemahan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah dalam sesi wawancara, di mana jawaban yang diberikan oleh informan terkadang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Selain itu, peneliti kadang-kadang memberikan pertanyaan yang hampir sama namun memiliki makna berbeda, yang menyebabkan informan memberikan jawaban yang serupa. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti harus mengulang pertanyaan dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari pertanyaan tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan yang telah dijabarkan dan dianalisis sebelumnya, peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap *stakeholder* Kementerian Perdagangan, pelaku *e-commerce*, dan TikTok Shop :

1. Pendekatan yang Seimbang: Pemerintah perlu mengambil pendekatan yang seimbang antara melindungi kepentingan lokal, terutama UMKM, dan memastikan perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Meskipun perlindungan terhadap UMKM penting, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku *e-commerce*.
2. Regulasi yang Komprehensif: Diperlukan regulasi yang komprehensif terkait dengan standar produk, perpajakan, dan privasi data untuk mengatasi

kekhawatiran dan memastikan lingkungan perdagangan yang sehat dan aman bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan digital.

3. Pengawasan yang Efektif: Penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan, diawasi dan ditegakkan secara efektif.
4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Kerjasama antara pemerintah, *platform social commerce* seperti TikTok Shop, dan industri lokal perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan perlindungan UMKM dan menjaga stabilitas ekonomi. Dialog terbuka dan keterlibatan aktif dari semua pihak dapat membantu mengidentifikasi solusi yang lebih baik.
5. Evaluasi dan Penyesuaian: Perlu adanya evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan yang diterapkan untuk memahami dampaknya secara menyeluruh dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan ekonomi secara digital yang dinamis dan terus berubah.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat membangun lingkungan perdagangan digital yang inklusif, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.